

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
Abul Haris Suryo Negoro, S.I.P., M.Si.

Buku ini merupakan karya penulis yang telah dipresentasikan di dalam berbagai seminar tingkat lokal dan nasional yang dilengkapi teori, serta masalah-masalah aktual yang terus menghantui setiap daerah. Ulasan dalam buku ini juga menjadi materi kuliah Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah dan Administrasi Pemerintahan Daerah untuk strata 1 pada Prodi Administrasi Negara. Terbitnya buku ini diharapkan menambah referensi bagi khalayak serta melahirkan kesadaran kritis yang berlanjut pada tindakan nyata demi terwujudnya pemerintahan daerah yang progresif, transparan, berkeadilan, serta menjauh dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

**DESENTRALISASI
DAN
OTONOMI
DAERAH**
DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
Abul Haris Suryo Negoro, S.I.P., M.Si.

DESENTRALISASI dan OTONOMI DAERAH
di Negara Kesatuan Republik Indonesia

**DESENTRALISASI
DAN
OTONOMI
DAERAH**

DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

 **INTRANS PUBLISHING**
REPUTASI KEJAYAAN MELAKUKAN MEMBACA

Jl. Joyokusumo Metro No. 42 Merjosari Malang
Telp. (+62)341-573650
Fax. (+62)341-588010
Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pemarkahan)
letters_malang@yahoo.com (Pemasaran)
www.intranspublishing.com

POLITIK U-18+

ISBN: 978-602-6293-66-8



9 786026 293688

Harga P. Jawa Rp. 84.000



Desentralisasi dan Otonomi
Daerah di Negara Kesatuan
Republik Indonesia



SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASIKAN UNTUK
MENDUKUNG KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA
www.intranspublishing.com

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
Abul Haris Suryo Negoro, S.I.P., M.Si.

Desentralisasi dan Otonomi
Daerah di Negara Kesatuan
Republik Indonesia



Intrans Publishing
Malang 2019

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Penulis:

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
Abul Haris Suryo Negoro, S.I.P., M.Si.

Cover: Rahardian Tegar

Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan pertama, Januari 2019

ISBN: 978-602-6293-68-8

Diterbitkan Oleh:

Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abdul Kholiq Azhari & Abul Haris Suryo Negoro
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia/Penyusun, Abdul Kholiq Azhari & Abul Haris Suryo Negoro - Cet. 1 - Malang: Intrans Publishing, 2019.
xvi + 270 hlm.; 15,5cm x 23cm

1. Administrasi Lokal-Otonomi

I. Judul

II. Perpustakaan Nasional

352.14

Didistribusikan oleh:

Cita Intrans Selaras

Pengantar Penulis ...

Otonomi daerah adalah derivat dari desentralisasi; karena itu, hampir setiap negara bangsa (*nation state*) menganut desentralisasi sebagai suatu asas dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Desentralisasi dipilih bukan hanya sekedar alternatif dari sentralisasi, melainkan merupakan subsistem dalam kerangka sistem organisasi negara. Kebijakan desentralisasi dilakukan dalam rangka pembagian kekuasaan secara vertikal sebagai *areal division of power* sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Keberadaan pemerintahan daerah (*local government*) serta hubungannya dengan pemerintah pusat (*central government*) tergantung pada bentuk dan susunan negaranya yakni apakah negara itu berbentuk negara kesatuan, negara federal, atau negara serikat.

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, sebagai wujud kesepakatan yang dicapai oleh para *the founding fathers*. Dipilihnya sistem pemerintahan desentralisasi oleh para

pendiri bangsa ini adalah sangat bijaksana yaitu membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan bingkai negara kesatuan melalui asas desentralisasi dan otonomi daerah sebagai elemen perekatnya.

Dipilihnya sistem pemerintahan desentralisasi, berimplikasi pada keharusan bagi pemerintah pusat mengimplementasikan kebijakan desentralisasi, otonomi daerah, dan pembentukan daerah otonom serta wilayah administrasi. Dalam usaha mewujudkan pemerintah daerah yang melayani dan menyejahterakan rakyat dengan cara-cara yang demokratis, partisipatif, adil, dan merata, menjadi landasan argumentasi bahwa pemerintahan perlu semakin didekatkan kepada masyarakat dengan kebijakan desentralisasi. Eksistensi administrasi pemerintahan daerah berkaitan erat dengan sistem politik dan ketatanegaraan, peraturan perundangan yang bersumber dari konstitusi, serta sistem administrasi negara/publik dan kewenangan yang didesentralisasikan kepada pemerintahan daerah otonom. Demikian pula kehadiran globalisasi, bukan saja mendorong gerak kehidupan masyarakat makin dinamis, tetapi juga mendorong berkurangnya peran negara dalam mengendalikan informasi dan perdagangan internasional serta terbatasnya kemampuan mengontrol dinamika masyarakat. Pemerintahan yang terdesentralisasi dengan memberikan otonomi luas kepada daerah sebagai langkah strategis menjawab kehadiran globalisasi.

Kebijakan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada aparat birokrasi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan internal dan mereduksi tantangan globalisasi menjadi peluang bagi kemajuan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut, di *set up* sebagai upaya pemberdayaan manajemen pemerintahan daerah, agar aparatnya memiliki kapasitas yang dapat mengadaptasi dan merespon isu-isu domestik maupun global. Desentralisasi fiskal, otonomi organisasi, otonomi kepegawaian, dan perencanaan adalah dalam rangka *empowering* manajemen dan administrasi pemerintah daerah. Tanpa keempat otonomi

internal tersebut implementasi kebijakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab banyak menghadapi kendala dari segi manajemen dan administrasi pemerintahan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah berperan mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya, atau menjadi pelayan masyarakat yang baik dan dapat meningkatkan aspek-aspek keterbukaan dan kesejahteraan. Implikasinya adalah birokrasi dan manajemen pelayanan publik di era otonomi daerah, menjadi dekat dengan masyarakat yang dilayani. Dengan demikian kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah esensinya adalah pemangkasan biokrasi sebagai upaya nyata meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta nondiskriminasi.

Buku ini merupakan karya penulis yang dipresentasikan di dalam berbagai seminar tingkat lokal dan nasional; sudah direvisi dan ditambahi baik teori, dan aplikasinya, juga menjadi materi kuliah Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah dan Administrasi Pemerintahan Daerah untuk strata 1 pada Prodi Administrasi Negara. Proses terwujudnya pemikiran dalam karya tulis ini merespon pada permasalahan aktual dari isu desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi dalam dimensi waktu tertentu, maka tulisan ini memiliki relevansi kontekstual, meskipun beberapa *issue* masih merupakan dilema yang berlanjut. Karena sifatnya sebagai karya tulis yang lahir dalam rentang waktu yang cukup lama dan membahas berbagai permasalahan yang bersinggungan, maka tidak dapat dihindari pemuatan beberapa alinea secara duplikatif. Meski demikian tentu tetap diharapkan tidak akan mengganggu pemahaman, karena masing-masing alinea menjadi bagian yang koheren dari kerangka berpikir yang berbeda.

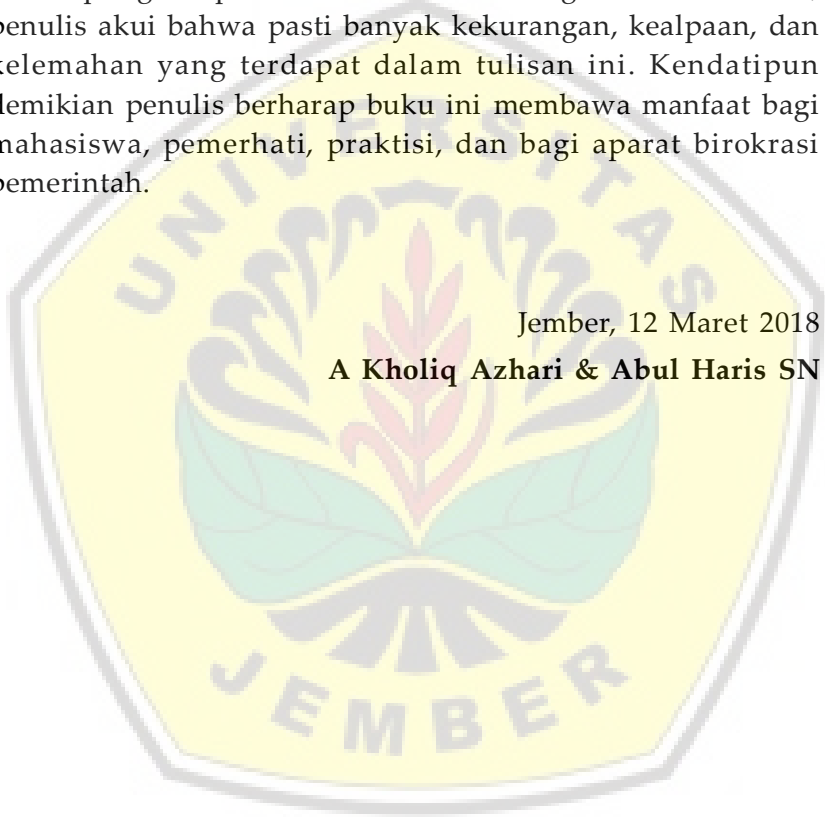
Demikian pokok-pokok pikiran yang mengantarkan para pembaca untuk memahami desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta implikasinya dalam merespon tuntutan globalisasi, pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah, penataan organisasi perangkat

Digital Repository Universitas Jember

daerah yang adaptif responsif dan pelayanan yang *excellence*. Dalam kesempatan ini tidak lupa, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada istri tercinta Dra. Sami Pujistutik, M.Si., ibunda Abul Haris Suryo Negoro, atas segala pengorbanannya selama penyelesaian penulisan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada semua pihak yang telah dengan tulus ikhlas membantu penulis merampungkan penulisan buku ini. Sebagai manusia biasa, penulis akui bahwa pasti banyak kekurangan, kealpaan, dan kelemahan yang terdapat dalam tulisan ini. Kendatipun demikian penulis berharap buku ini membawa manfaat bagi mahasiswa, pemerhati, praktisi, dan bagi aparat birokrasi pemerintah.

Jember, 12 Maret 2018

A Kholiq Azhari & Abul Haris SN



Pengantar Penerbit ...

Salah satu semangat awal digulirkannya otonomi daerah adalah keinginan untuk mendekatkan negara pada rakyat. Otonomi daerah secara esensial memberikan keleluasaan daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang dimiliki daerah menuntut pemerintah daerah untuk melahirkan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel serta pelayanan yang berkeadilan. Namun, seiring berjalannya Era Reformasi, taring desentralisasi masih saja tumpul di hadapan perubahan yang selalu dinamis. Tidak salah ketika banyak kalangan yang *klaim* bahwa desentralisasi tak ibaratnya dengan sentralisasi, desentralisasi hanyalah penyebaran para bandit-bandit yang dulunya bersarang di pusat dan kini merebak di setiap daerah.

Atas dasar kewenangan penuh yang dimiliki daerah, para orang-orang kuat di aras lokal dalam hal ini; elite ekonomi, elite birokrasi, elite partai politik, elite agama dan elite masyarakat

Digital Repository Universitas Jember

kembali mengambil kekuatan bersama dalam proses pengamanan dengan tujuan kepentingan yang sama yakni, pemanfaatan kekayaan daerah yang hanya dimiliki dan dikuasai oleh kelompok koalisi lima elemen tersebut. Nyaris tak ada gerakan akar rumput yang membendung kekuatan elite di atas. Andai pun ada, proses penjinakan pada kelompok oposisi yang kuat terus dijalankan. Butuh iman gerakan yang kokoh jika keinginan mendekatkan negara pada rakyat masih ada, dan jika keinginan untuk menumbuh-kembangkan demokratisasi di aras lokal masih tetap teguh.

Buku ini merupakan karya penulis yang dipresentasikan di dalam berbagai seminar tingkat lokal dan nasional yang dilengkapi teori, serta masalah-masalah aktual yang terus menghantui setiap daerah. Kemudian menjadi materi kuliah isu dan kebijakan Otonomi Daerah dan Administrasi Pemerintahan Daerah untuk strata 1 pada Prodi Administrasi Negara.

Terbitnya buku ini diharapkan menambah referensi bagi khalayak serta melahirkan kesadaran kritis yang berlanjut pada tindakan nyata demi terwujudnya pemerintahan daerah yang progresif, transparantif, berkeadilan serta menjauh dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terakhir, masukan atas penerbitan sangat kami terima demi perbaikan penerbitan berikutnya.

Selamat membaca! Maru rebut perubahan dengan membaca!

Daftar Isi ...

Pengantar Penulis __ *v*

Pengantar Penerbit __ *ix*

Bagian Pertama: Indonesia Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi __ 1

- A. Alasan Mendasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Menganut Sistem Desentralisasi __ 3
 - 1. Alasan Sejarah dan Kesepakatan Para Pendiri Bangsa __ 6
 - 2. Alasan Situasi dan Kondisi Wilayah __ 9
- B. Desentralisasi dan Daerah Otonom dalam Konstitusi __ 11
 - 1. Amandemen UUD 1945: Pergeseran Sistem Pemerintahan Daerah __ 12
 - 2. Pergeseran Sistem Sentralisasi ke Sistem Desentralisasi sebagai Wujud Reformasi __ 15
- C. Bandul Desentralisasi dan Dekonsentrasi di Negara Keatuan Indonesia __ 17
 - 1. Mencari Titik Keseimbangan antara Sentralisasi dan Desentralisasi __ 19
 - 2. Hubungan Pusat-Daerah: Pola Keagenan dan Kemitraan __ 21

- D. Daerah Otonom dalam Negara Kesatuan Indonesia __ 26
 - 1. Otonomi Daerah Hasil Amandemen Kedua __ 27
 - 2. Model Otonomi Daerah di Indonesia Pascareformasi __ 29
 - 3. Kebijakan Otonomi Daerah: Kemandirian Manajemen Pemerintah Daerah __ 31
 - E. Visi Misi Pemberian Otonomi Daerah __ 34
 - F. Otonomi Daerah Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Demokratis __ 36
-

Bagian Kedua: Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan __ 43

- A. Negara Kesatuan dan Negara Federasi __ 45
 - 1. Negara Federal: Negara dalam Negara __ 46
 - 2. Negara Kesatuan: Tidak Ada Negara dalam Negara __ 47
 - a. Negara Kesatuan dengan Sistem Sentralisasi __ 49
 - b. Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi __ 51
 - B. Argumentsi dan Katariteritik Sistem Desentralisasi __ 53
 - C. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Desentralisasi __ 56
 - D. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom di Negara Kesatuan __ 59
 - E. Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan __ 63
 - 1. Karakteristik Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan __ 65
 - 2. Pola Pemerintahan Daerah __ 69
 - 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah __ 71
 - 4. Kepala Daerah di Negara Kesatuan Indonesia __ 73
-

Bagian Ketiga: Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Globalisasi __ 80

- A. Globalisasi; Proses, Aktor Utama, Kompetitor dan Peluang __ 84
 - 1. Proses Globalisasi __ 84
 - 2. Aktor Utama dan Kompetitor Pasar Global __ 86

3. Peluang dan Tantangan Globalisasi; Malapetaka atau Berkah __ 88
- B. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Baru __ 90
- C. Otonomi Daerah: Prakarsa Kreatif, Mengelola Potensi Ekonomi Daerah __ 92
- D. Globalisasi Menuntut Pejabat dan Pelaku Ekonomi Terus Belajar __ 94
 1. Learning Organization Sebagai Upaya Pengembangan Modal Manusia __ 95
 2. Learning Organization __ 96
 3. Proses Belajar Individual Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas __ 98
 4. Otonomi Daerah Mereduksi Hambatan Learning Organization __ 101
- E. Otonomi Daerah: Keleluasaan Aparatur Berkreativitas dan Berinovasi Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal __ 102
 1. Otonomi Daerah Mendorong Daya Saing Daerah __ 104
 2. Otonomi Daerah Mendorong Terciptanya Produk Unggulan __ 106
 3. Produk Unggulan Sebagai Daya Tawar Masuk Pasar Internasional __ 108
 4. Menerobos Pasar Internasional Bertumpu Produk Unggulan Lokal __ 110

Bagian Keempat: Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berbasis Otonomi Organisasi __ 115

- A. Otonomi Organisasi __ 117
- B. Organisasi dalam Perspektif __ 120
 1. Model Organisasi Sintesa __ 123
 2. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Moel Minzberg __ 125
 3. Penataan Perangkat Daerah: Perspektif *Reinventing Government* dan *Good Governance* __ 128

4. Organisasi Pemerintah Daerah Bertumpu Kewenangan __ 130
 5. Struktur Organisasi Berbasis Human Capital __ 133
 - C. Restrukturisasi Perangkat Daerah Bertumpu PP No. 41 __ 137
 - D. Penataan Dinas untuk Daerah Otonom __ 141
 1. Penyusunan Dinas Daerah Bewawasan Lingkungan __ 142
 2. Penyusunan Dinas Bertumpu Visi Strategis __ 144
 3. Struktur Dinas Daerah Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Daerah __ 146
-

Bagian Kelima: Administrasi Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia __ 151

- A. Masalah Terminologi Administrasi di Indonesia __ 153
- B. Administrasi Pemerintahan Daerah Negara Kesatuan Indonesia __ 157
- C. Prinsip Negara Kesatuan Indonesia dan Implikasinya Terhadap Administrasi Pemerintahan Daerah __ 164
 1. Bandul Administrasi Pemerintahan Daerah di Antara Sistem Sentralisasi dan Desentralisasi __ 167
 2. Pemerintahan Daerah Tidak Memiliki Kewenangan Pemerintahan __ 172
 3. Kewenangan Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia __ 177
 4. Pejabat Politik dan Pejabat Birokrasi Karier dalam Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah __ 180
- D. Pemerintah Daerah Berbasis Tata Pemerintahan yang Baik __ 184
 1. Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah Berbasis Efektivitas dan Kinerja __ 187
 2. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Amanah __ 190
 3. Jejaring Pemerintah Daerah dan Keswadayaan *Civil Society* __ 192
 4. Karakteristik Tata Pemerintah Daerah yang Baik __ 194

Bagian Keenam: Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospeknya __ 200

- A. Otonomi Daerah: Pemerintahan Dekat dengan Masyarakat __ 202
- B. Pemerintahan: Pelayanan Kepada Masyarakat __ 206
- C. Pelayanan Publik: Birokrasi Penyelenggara, Pelanggan dan Barang __ 209
 - 1. Birokrasi Pelayanan Publik __ 210
 - 2. Pelanggan Pelayanan Publik __ 213
 - 3. Barang Publik dan Biaya Pelayanan __ 216
 - 4. Prinsip-prinsip Pelayanan: TQM dan *Good Governance* __ 221
- D. Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan __ 223
- E. Masalah Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah __ 226
- F. Prospek Desentralisasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah __ 229
 - 1. Prospek Pelayanan Publik Bertumpu *Good Governance* __ 232
 - 2. Pelayanan Publik Bertumpu *Reinventing Government* __ 234
 - 3. Pelayanan Publik Bertumpu Dinamika Masyarakat __ 236

Daftar Pustaka __ 241

Tentang Penulis __ 266

Tentang Penulis



Abdul Kholiq Azhari dilahirkan di Banyuwangi Jawa Timur 26 Juli 1956. Lulus sekolah dasar pada SDN Karangsari II tahun 1970, kemudian melanjutkan ke MTs Parijatah lulus tahun 1973 dan menyelesaikan pendidikan menengah atas pada SMA FIP Tanggul Jember tahun 1976. Pada tahun 1977 diterima sebagai mahasiswa Fakultas Sosial dan Politik (Fak Sospol) Universitas Negeri Jember (UNED) dan lulus Program Strata 1 pada tahun 1982. Sehubungan hilangnya ijazah SD, pada tahun 1983 mengikuti ujian persamaan sekolah dasar di Kecamatan Puger Jember dan lulus. Pada tahun 1992 diterima pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta pada program studi Ilmu Administrasi dan lulus pada tahun 1996.

Sejak tahun 1989 menjadi tenaga pengajar tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Tahun 2002-2011 menjadi staf pengajar Magister Ilmu Administrasi (S2) Pascasarjana Universitas Jember. Sejak tahun 1982 menjadi dosen tidak tetap Fisip

Universitas Moch. Sroedji Jember. Tahun 1995-1998 sebagai Peneliti LP2OD PAU-IS Universitas Indonesia Jakarta. Tahun 2000-2005 menjadi anggota Tim Otonomi Daerah unsur akademisi, dan pada tahun 2001-2005 menjadi Ketua Tim Asistensi Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember.

Tahun 1990 mengikuti Kursus singkat "Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Pedesaan dalam Perspektif Komparatif" dan "Monitoring dan Evaluasi Program" tahun 1992 pada PAU-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mengikuti Penataran Tenaga Peneliti Tingkat Dasar tahun 1991 dan tahun 1997 mengikuti Diklatsar Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Angkatan X yang diselenggarakan Universitas Jember. Pada tahun 2008 mengikuti Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Hibah Bersaing diselenggarakan Lembaga Penelitian Unej. Pada tahun 1999 mengikuti Pelatihan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah diselenggarakan Pusat Studi Kependudukan Universitas 11 Maret Surakarta Solo. Tahun 2006 mengikuti Pelatihan Komputer Statistik Multivariat diselenggarakan LPSM Akuntansi Malang, dan Pelatihan Perpajakan (Brevet A dan B) pada tahun 2017.

Sewaktu menjadi Mahasiswa aktif pada organisasi kemahasiswaan pernah menjadi anggota BPM dan Ketua Umum Senat Mahasiswa. Pernah aktif dalam Ormas Kepemudaan menjadi Wakil Sekretaris DPD AMPI DATI II Jember 1989-1994. Aktif dalam organisasi profesi menjadi Wakil Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jember 20012-2015. Dalam pengembangan ilmu, aktif menjadi pemakalah Seminar Nasional yang diselenggarakan PP AIPI dan dalam segi kajian dan penelitian aktif menjadi peneliti Hibah Bersaing yang difasilitasi Lembaga Penelitian Universitas Jember. Penulis juga aktif menulis dalam Jurnal Ilmiah di lingkungan Universitas Jember.



Abul Haris Suryo Negoro, lahir di Jember, pada tanggal 29 oktober 1982. Pada tahun 2006, penulis meraih Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Pada Tahun 2009, Meraih Gelar Master Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Jember. Penulis sempat pula mengenyam Pendidikan Doktoral di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Sejak kuliah S1, penulis sering mengikuti forum-forum diskusi di dalam kampus. Selain itu, aktif dalam organisasi sampai Badan Eksekutif Mahasiswa. Sejak tahun 2000, aktif sebagai redaktur majalah politik *Hima* prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Penulis juga sempat menjadi redaktur jurnal "*Dialektika*" BEM FISIP Universitas Airlangga. Penulis juga aktif di sejak 2011 sebagai pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (API) cabang Jember sampai saat ini.

Penulis juga aktif dalam penelitian yang berbasis keilmuan ilmu politik dan ilmu administrasi dengan konsentrasi kebijakan publik pemerintahan daerah. Hasil riset yang pernah dihasilkan tentang konvensi Capres sebagai strategi politik partai Golkar. Penulis juga sempat aktif dalam penelitian bertema strategi dalam pemilihan kepala daerah. Penulis saat ini aktif dalam Riset Group "Institute Maritime for Studies" Universitas Jember dan menjadi anggota Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI). Penulis juga sering menjadi pemakalah di beberapa acara seminar baik internasional maupun nasional seperti Konferensi International Pembangunan Islam (KIPI). Selain itu, beliau juga menjadi narasumber seminar di tingkat mahasiswa di lingkungan universitas Jember.

Pengalaman pekerjaan penulis selama ini beragam, mulai peneliti, konsultan dan dosen. Pada tahun 2006-2009 menjadi dosen luar biasa di Universitas Moch. Soerodji Jember. Sejak

tahun 2009, penulis menjadi dosen tidak tetap di STIA Pembangunan Jember. Selain itu, sejak tahun 2015, penulis juga menjadi dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



